

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan kepentingan nasional pada tiap-tiap negara pada dasarnya telah mendorong aktivitas dan pergerakan negara untuk mendapat kepentingan tersebut. Dalam hal ini diplomasi menjadi sumber dari berangkatnya peranan negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya melalui hubungan-hubungan negara dengan negara lainnya. Kondisi ini melahirkan keterlibatan oleh berbagai negara dalam suatu kondisi yang saling menguntungkan atau memberi pengaruh terhadap masalah maupun fokus tertentu yang umumnya terjadi secara global. Diplomasi menjadi satu dari banyak cara dalam menjadi alat bagi suatu negara untuk melakukan promosi atas kepentingan negara dengan melakukan hubungan dengan negara lain tanpa melibatkan peperangan. Dalam hal ini, dengan diplomasi identifikasi terhadap kepentingan yang berbeda dapat dilakukan dan di sisi lain kerja sama dapat lahir dari kepentingan yang sama.

Pada hakikatnya yang telah disepakati oleh berbagai negara sejak tahun 2000 bahwa terdapat paradigma tujuan-tujuan yang telah menjadi sasaran secara global. Komitmen ini kemudian bukan bagian dari implementasi hukum yang mengikat namun telah menjadi indikator pembangunan di seluruh dunia yang secara garis besar dilakukan untuk pengurangan kemiskinan di seluruh dunia. Indikator-indikator yang membentuk ini juga mencakup mengenai pemberdayaan perempuan yang

mana dalam hal ini menjurus pada kesetaraan gender. Perjanjian ini bermula dari deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs) yang sejak awal telah menggait konsep kesetaraan gender sebagai landasan untuk solusi pembangunan. Dalam hal ini dengan melihat bahwa kesetaraan gender membawa pada penghidupan yang lebih layak dengan mempromosikan kesetaraan dalam bidang edukasi, partisipasi perempuan di lapangan kerja, kapabilitas kerja maupun pendapatan (Sandler, 2007)

Secara global, keberadaan ketidaksetaraan gender merupakan isu yang mengkhawatirkan dan masih menjadi masalah yang masih ada pada negara-negara secara global. Bagaimana gambaran negara-negara ini masih gagal dalam menegakkan kesetaraan gender adalah dengan melihat bahwa secara umum negara-negara melakukan implementasi mengenai kesetaraan gender ke dalam sistem pemerintahan ataupun kebijakan yang hanya berfokus pada satu sektor saja. Ini kemudian membuat keberadaan kesetaraan gender yang esensial bagi negara-negara perlu diimplementasikan secara seimbang dalam berbagai sektor. Keberadaan ketidaksetaraan gender menjadi proses yang dapat menghasilkan halangan bagi perkembangan dalam bidang ekonomi maupun perkembangan manusia akibat dari terciptanya kejahatan terhadap perempuan. Esensi dari peristiwa ini pada akhirnya dapat berdampak buruk pada keamanan global dengan menitikberatkan pada negara yang tidak mampu menaikkan esensi dari kesetaraan gender dan hadirnya kejahatan kemanusiaan pada negaranya. Konsep dari ketidaksetaraan gender khususnya dalam bidang ekonomi

melihat pada fenomena ketimpangan upah pada perempuan dan laki-laki, dimana dalam hal ini kaum perempuan memiliki penghasilan yang lebih rendah dalam sektor kerja formal, ini kemudian membawa pada kehidupan kaum perempuan yang lebih memiliki kemungkinan dalam kemiskinan, hal ini juga berlandas dari bagaimana kaum perempuan lebih sering mengambil peran dalam lingkup pekerjaan rumah tangga (Wani & Dastidar, 2019).

Secara teoritis maupun studi empiris mengenai kesinambungan dari tidak terpenuhinya kesetaraan gender dalam peran ekonomi, pada dasarnya melihat bagaimana hal ini menghubungkan ketidaksetaraan gender dengan faktor-faktor pendapatan, pekerjaan, maupun edukasi. Dalam hal ini beberapa berpendapat bahwa dalam mendorong peran perempuan dalam pendidikan, perubahan teknologi mengambil kontribusi yang signifikan dalam mempromosikan kepentingan perempuan ini agar tingkatan kemiskinan dapat ditekan. Pendapat lainnya juga melihat bahwa faktor eksternal dalam meningkatkan pendidikan dan kesehatan memberikan dorongan perkembangan sehingga membuka peluang keluarnya dari kemiskinan (Klasen, 2018). Melihat dari contoh kasus yang banyak terjadi pada negara-negara Asia Timur yang memiliki kemampuan bersaing pada pasar dunia dengan mengandalkan pada industri manufaktur dengan arah pada sektor ekspor yang banyak digerakkan oleh perempuan, maka pemanfaatan perempuan-perempuan dalam dunia pendidikan yang berkembang dan bertumbuh bersamaan dengan keterbukaan kontribusi

perempuan dalam sektor-sektor terkait, dapat membantu hadir dan berkembangnya industri ekspor yang kompetitif.

Pada kasus Indonesia sendiri, gender masih menjadi bagian dari faktor yang menentukan dalam dunia kerja, yang menentukan dalam pemberian upah, penerimaan karyawan, maupun penetapan beban kerja. Ini kemudian mengakibatkan pada jumlah partisipasi yang berbeda dengan berat sebelah pada partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan yang terlihat melalui data Tenaga Kerja Formal tahun 2021 yang menunjukkan angka partisipasi laki-laki berjumlah 43,39%, sedangkan perempuan berjumlah 36,20% (BPS, 2024).

Indonesia sejak lama telah melakukan implementasi nilai-nilai kesetaraan gender dalam kebijakan pemerintahan. Presiden-presiden Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan mengenai gender. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang membahas mengenai integrasi gender dalam pembangunan nasional. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dilakukan penetapan RPJMN bersamaan dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 mengenai program Pembangunan yang Berkeadilan. Kemudian pada masa pemerintahan Joko Widodo Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 mengenai RPJMN 2015-2019 dikeluarkan, juga dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 mengenai RPJMN 2020-2024.

Walaupun begitu, pencapaian dari integrasi kesetaraan gender dalam perangkat pemerintahan tidak langsung mengeluarkan hasil yang maksimal khususnya pada bidang ekonomi, dimana pada kenyataannya, belum sampai pada pemaksimalan manajemen ekonomi dan lapangan usaha dalam lingkup perikanan, kehutanan maupun pertanian sebagai pasokan pendapatan penduduk. Kemudian, faktor lainnya juga dimana manajemen koperasi dan usaha kecil dan menengah belum mencapai tahap optimal. Pada dasarnya, pengoptimalan akses UMKM yang dapat dikatakan menjurus pada kemampuan ekonomi oleh kaum perempuan masih belum tercapai seperti pada masalah permodalan maupun akses dan lainnya (Nurdin, 2024).

.Dengan peningkatan kesetaraan gender yang sejalan dengan peningkatan ekonomi sebagaimana sesuai dengan substansi dari MDGs atau saat ini telah berubah menjadi SDGs. Ini kemudian menciptakan berbagai bentuk pergerakan atau aktivitas yang berkesinambungan dengan penciptaan kehidupan yang lebih sejahtera dan setara tersebut. Salah satu usaha tersebut melalui program Women20. Keberadaan atau lahirnya Women20 berasal dari forum kerja sama berbagai negara yang mencakup 19 negara dan saat ini telah menjadi 2 wilayah ekonomi, yaitu G20. Forum kerja sama ini secara umum memiliki orientasi terhadap ekonomi global serta isu-isu yang terkait di dalamnya.

Pada era globalisasi dengan peningkatan kerja sama yang telah terjalin dalam hubungan ekonomi ini, apa yang menjadi tantangan dalam orientasi kerja sama ini salah satunya tidak lepas dari kesetaraan gender

yang kemudian memungkinkan lahirnya grup atau forum resmi dari G20, yaitu Women20 (W20) yang secara umum memiliki fokus pada pengembangan potensi dan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi. Dalam hal ini juga, diplomasi Indonesia telah memberikan dukungan terhadap diplomasi yang terpadu dalam bidang ekonomi, seperti yang telah dituliskan dalam Arah Kebijakan dan Strategi, Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019, bahwa diplomasi ekonomi menjadi satu bagian dari 8 arah kebijakan yang menjadi kesepakatan (Sabaruddin, 2017).

Women20 sendiri merupakan engagement group dari G20 yang telah dirumuskan sejak tahun 2014 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Australia dengan tujuan ditahun 2025 pada penurunan presentase ketimpangan tingkat partisipasi dalam Angkatan kerja perempuan dan laki-laki (“25 by 25”), kemudian pertemuan perdana Women20 (W20) dilaksanakan pada presidensi Turki ditahun berikutnya. Memiliki sistem yang sama seperti presidensi G20, pelaksanaan W20 dilakukan pada negara yang menjalankan presidensi G20 tahun tersebut.

Dalam membawa isu kesetaraan gender dalam lingkup G20 dan perkembangannya yang membantu mencapai tujuan-tujuan yang ada, negara-negara diberikan kesempatan dalam berkontribusi dengan tidak hanya membawa prioritas kesetaraan gender global, namun juga berdasar pada latar nasional dan komitmen internasional yang sedang berlangsung. Pada pemanfaatan ini, presidensi W20 Indonesia yang dilaksanakan pada

tahun 2022 menjadi batu loncatan dalam proses pemulihan pasca Covid-19 dengan tema “*Recover Together, Recover Stronger*” Indonesia membawa tiga bahasan utama yang mana adalah mengenai kesehatan global, peralihan energi dan transisi ekonomi digital. Keterlibatan perempuan dalam pemulihan pasca Covid-19 merupakan bagian dari komitmen yang dinyatakan oleh Chair Women20 Indonesia, Hadriani Uli Silalahi, yang juga memberikan pernyataan atas pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam bidang perekonomian, rekonstruksi pembangunan serta layanan kesehatan (Gunawan, 2022).

Momentum W20 ini tidak hanya membuka jalan bagi perekonomian Indonesia, namun juga membawa unsur diplomasi seperti yang dinyatakan oleh Co-Chair W20 Indonesia, Dian Siswarini yang melihat presidensi ini melalui kacamata *global diplomacy*, dimana keterlaksanaan presidensi Indonesia pada W20 maupun G20 menjadikan posisi Indonesia berada pada pusat diplomasi diantara 20 anggota G20 (Yani, 2022). Pembawaan ini kemudian dapat membuka kesempatan bagi Indonesia untuk menarik investasi melalui program-program yang dibawakan pada presidensi, memperlihatkan keberagaman Indonesia, serta membuka skala daya tarik bagi wisata Indonesia.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana diplomasi Indonesia yang diintegrasikan melalui grup atau forum resmi dari G20, yaitu Women20 (W20) dan bagaimana pengembangan potensial secara global yang melibatkan berbagai negara ini memberi pengaruh terhadap kesetaraan gender di Indonesia. Adapun program-program sekaligus visi dari Women20 merupakan alat penggerak dalam mendukung pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi seperti yang telah menjadi salah satu tujuan utama dari negara-negara, dengan rangka penyelesaian ini pada bagian atau sektor kesetaraan gender dalam mendukung orientasi baik bagi G20 yang sekaligus memiliki orientasi yang sama dengan SDGs. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana peran diplomasi Indonesia dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam bidang ekonomi di Indonesia, bagaimana Indonesia menjangkau masalah-masalah terkait hal tersebut bersama dengan forum multilateral yang telah tersedia dan terintegrasi.

Berdasarkan pernyataan di atas kemudian penulis dapat mengambil rumusan pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana strategi diplomasi Indonesia melalui Women20 terhadap peningkatan kesetaraan gender di Indonesia?
2. Bagaimana dampak diplomasi Indonesia melalui Women20 mempengaruhi kesetaraan gender di Indonesia?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

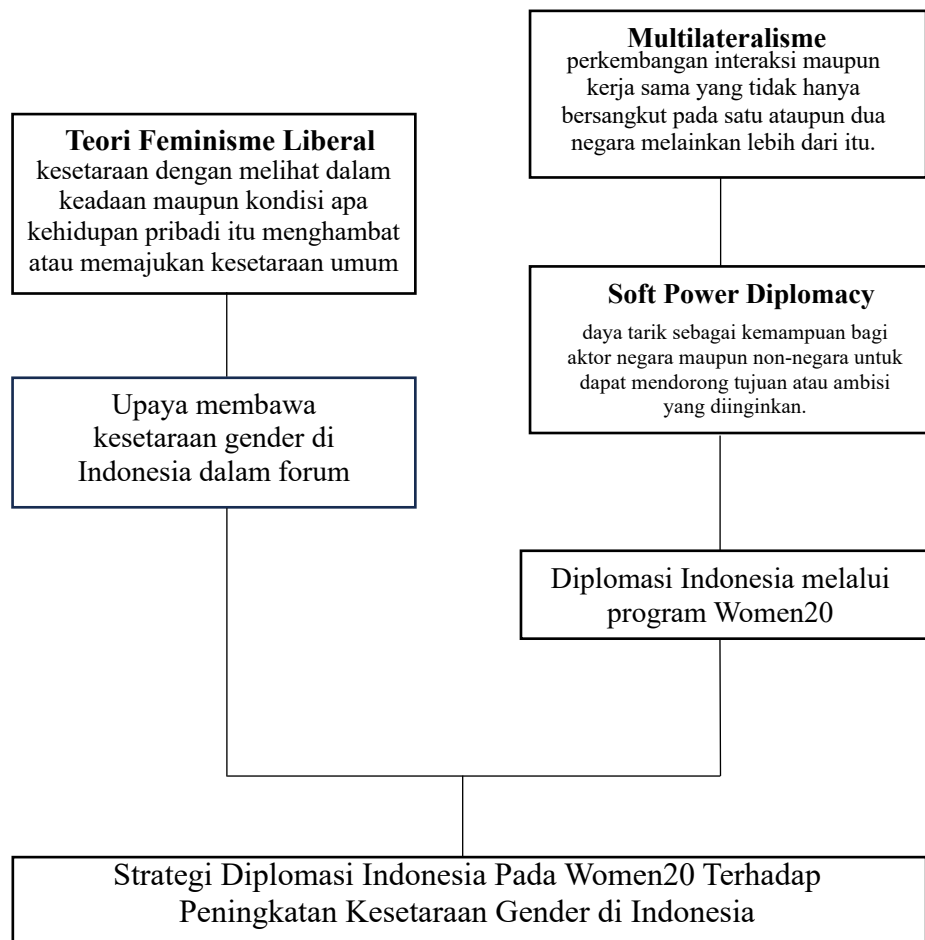
1. Untuk mengetahui strategi diplomasi Indonesia pada pelaksanaan Women20
2. Untuk mengetahui bagaimana peran diplomasi Indonesia mempengaruhi kesetaraan gender di Indonesia melalui program Women20

### **D. Manfaat penelitian**

Dengan berdasar pada tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, diharapkan penelien ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi terhadap kajian ilmu hubungan internasional, dengan secara khusus mengenai diplomasi dan peran serta negara terhadap kesetaraan gender dalam bidang ekonomi.
2. Sebagai salah satu referensi dalam memahami kontribusi suatu negara dalam mewujudkan ekonomi yang sejahtera melalui upaya dalam kesetaraan gender.

## E. Kerangka konseptual



### 1. Teori Feminisme Liberal

Melihat kepada teori-teori yang dihasilkan melalui gerakan feminisme semenjak kurang lebih abad ke-19 salah satunya memberi pengeluran terhadap hadirnya teori feminisme liberal. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa keberadaan gerakan feminisme yang melahirkan teori-teori feminisme ini sendiri lahir di Eropa ketika masa pencerahan saat itu terjadi, dari sini kemudian akar-akar dari perjuangan perempuan di Eropa serta dengan negara-negara terjajah Eropa saat itu. Bahkan ketika masa-masa awal lahirnya pergerakan feminisme yang saat itu diberi nama

pertama kali oleh Charles Fourier yaitu seorang aktivis sosial utopis ditahun 1837, perjuangan yang diupayakan tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh abad masa kini yaitu atas dasar kerugian akibat dari sifat patriarki yang memberikan kekurangan dalam berbagai bidang-bidang kehidupan seperti pekerjaan, sosial maupun pendidikan.

Berangkat dari lahirnya gerakan feminisme, muncul feminisme liberal yang membawakan gagasan akan kemerdekaan penuh dan individual untuk kaum perempuan (Kristeva, 2016). Rancangan pemikiran dari teori ini berlandas pada rasionalitas, dengan melihat bahwa tiap-tiap manusia memiliki kapasitas pemikiran dan tindakan yang rasional dan oleh karena itu penindasan atau keterpinggiran kapasitas hidup perempuan merupakan hal yang tidak relevan sehingga tumpuan akan kebebasan dan kesetaraan terhadap akar rasionalitas ini perlu ditegakkan.

Pemahaman akan feminisme liberal sendiri terpecah di dalamnya akan dasar pada pemahaman terhadap kebebasan yang kemudian membagi feminisme liberal (Baehr, 2020). Pertama terdapat feminisme liberal klasik yang mengarah pada batas tanggung jawab politik feminisme dimana hanya menentang keberadaan hukum yang mendiskriminasi kaum perempuan dari kaum laki-laki. Pemahaman akan kebebasan pada kaum ini melihat bahwa makna kebebasan adalah bebas dari campur tangan paksaan atas dasar kepemilikan atas diri sendiri. Disamping itu, hadirnya kekuasaan negara dianggap serta-merta hanya dapat melakukan sifat memaksa dengan tujuan perlindungan terhadap hak kebebasan.

Di sisi lain, kaum feminis egaliter-liberal memiliki argumen bahwa kesetaraan bagi perempuan dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis pada masyarakat liberal memiliki banyak proses dan keharusan di dalamnya yang dimana dalam hal ini untuk membantu kebebasan pribadi dan politik perempuan. Kaum feminis egaliter-liberal lebih melihat pada peran negara yang dapat bermanfaat untuk mencapai tujuan-tujuan dari pergerakan feminis yang selanjutnya juga berhubungan dalam sistematika pemerintahan yang demokratis.

Dalam perkembangan yang ada dengan membawa aliran-aliran baru dari aliran yang telah ada, kepemilikan konsep dari feminisme liberal pada dasarnya berfokus pada peralihan politik dan regulasi untuk dapat memenuhi hak-hak serta peluang yang sama terhadap perempuan baik dalam hal politik, upah kerja maupun pendidikan (Kuersten, 2003). Dalam memahami dan melihat domain privat, feminisme liberal memiliki arah yang lebih pada kesetaraan dengan melihat dalam keadaan maupun kondisi apa kehidupan pribadi itu menghambat atau memajukan kesetaraan umum (Maulid, 2022).

Melalui penjabaran yang terpapar di atas, dapat dilihat bahwa gerakan feminisme merupakan bagian dari pergerakan global yang pada dasarnya perlu untuk dituntut dalam sebuah sistematika negara serta masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan. Partisipasi menjadi salah satu kunci dalam pengembangan dan perbaikan sistematika gender yang telah berkembang di antara masyarakat umum. Partisipasi

politik misalnya, yang merujuk pada bentuk representasi suatu individu maupun kelompok dalam mekanisme pemerintahan yang kemudian memberikan potensi pengaruh pada warga negara. Partisipasi ini kemudian memberikan gaya terhadap terdorongnya peran dalam pengambilan keputusan kebijakan publik maupun keterlibatannya dalam suatu tindakan publik yang aktif dimana kembali membawa dampak terhadap masyarakat.

Dalam sistematika pemerintahan Indonesia sendiri, tujuan dan dasar dari partisipasi tersebut telah terkandung dalam dasar negara yang menyebutkan '*keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*'. Maka, dalam pembangunan berkelanjutan negara Indonesia yang utuh, kemampuan dalam memajukan dan mengedepankan kesetaraan gender merupakan hal yang saling terkait. Dalam hal ini penekanan akan kesetaraan yang utama dalam pembangunan yaitu strategi, regulasi, perencanaan anggaran dalam pembangunan yang dalam prosesnya diupayakan keluar dari stereotip gender.

## **2. Multilateralisme**

Perkembangan dari kerja sama maupun interaksi yang terjadi antar negara-negara atas dasar sebuah tujuan, pandangan maupun faktor persamaan lainnya yang kemudian menghasilkan berbagai jenis perkembangan yang signifikan bagi tiap-tiap negara, dimana hal ini sejatinya tak dapat dihindari dengan dasar kebutuhan-kebutuhan yang ada pada tiap negara. Konsep dari multilateralisme membawa pada perkembangan interaksi maupun kerja sama yang tidak hanya bersangkut

pada satu ataupun dua negara melainkan lebih dari itu. Secara tradisional, pemahaman akan multilateralisme merupakan bagian dari pelaksanaan diplomasi yang beradasar pada prinsip yang menjunjung kesetaraan dan keadilan, serta dengan transparansi di dalamnya yang melibatkan tiga negara ataupun lebih dengan berlandas pada aturan perilaku umum (Reus-Smit, 1999; Ruggie, 1992). Melalui prosesnya kemudian, multilateralisme dianggap sebagai praktik yang sangat sosial dan juga dinamis (Ba, 2020). Selain itu pula, disebutkan bahwa multilateralisme menjadi praktik yang memiliki banyak ragam, hal ini dikarenakan keterlaksanaan multilateralisme merupakan cerminan dari berbagai kelompok aktor dan aspek sosial pembangunan yang menghasilkannya.

Dalam pelaksanaannya, multilateralisme disadari memiliki kemampuan dalam alokasi ide yang berfungsi dalam sistem internasional (Allan et al., 2018), serta memiliki prosedur yang dapat disetujui secara luas dengan tujuan menghasilkan peraturan internasional (Raymond, 2019). Dalam kajiannya, multilateralisme memiliki hubungan yang signifikan dengan sistematika liberal, dimana multilateralisme menggambarkan sistem internasional kontemporer melalui praktik konstitutif yang tergabung melalui adanya kedaulatan serta dengan hukum internasional (Raymond & Sherman, 2024).

Kaitan multilateralisme dengan diplomasi dapat dilihat dari hubungan kedua subjek tersebut yang tergambar melalui pendekatan institusionalisme liberal yang diberikan oleh multilateralisme terhadap

diplomasi (Gupta et al., 2021). Melalui kutipan dari (de Wijk et al., 2020) konsep dari multilateralisme sendiri dapat ditandai dengan lima kondisi, yaitu: sejenis aliansi keamanan, perdagangan dan pertukaran terbuka, hubungan yang berlandas pada aturan, perkembangan dan penyebaran demokrasi liberal, serta ide bahwa relasi dan interaksi yang stabil dapat menjinakkan politik kekuasaan demi keuntungan bersama.

Indonesia yang tergabung dengan beberapa negara lainnya dalam G20 merupakan bentuk multilateralisme yang membawa negara-negara yang terlibat dalam hal ini adalah Indonesia, Brasil, Argentina, Australia, Kanada, Cina, Prancis, Jerman, India, Italia, Jepang, Mexico, Korea Selatan, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat, serta Uni Eropa (EU) dan Uni Afrika (AU). Sebagai sebuah konteks umum, negara-negara ini terkumpul dengan fokus pada perekonomian. Dalam hal ini, multilateralisme menjadi wadah bagi negara-negara kecil serta menengah dalam mendapat kontrol yang signifikan terhadap negara-negara yang lebih kuat, serta juga dapat memberikan pengaruh tambahan. Multilateralisme yang membawa pada kerja sama yang saling menguntungkan bahkan dapat menghasilkan lembaga-lembaga dianggap dapat membawa pada kerukunan atau perdamaian dan kesejahteraan yang selaras. Bahkan, dalam beberapa studi yang lebih dalam melihat hubungan internasional dapat berubah melalui kerja sama internasional.

### 3. *Soft Power Diplomacy*

*Power* atau kekuasaan secara umum memiliki arti kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk mendapatkan *power* tersebut terdapat beberapa cara, yaitu: melalui ancaman paksaan; bujukan atau pembayaran; serta melalui persuasi dan daya tarik. Konteks dari diplomasi sendiri memiliki keterkaitan yang erat dengan hukum memperoleh *power* dalam seni pengelolaan hubungan dan melalui negosiasi. Pemanfaatan diplomasi yang signifikan bagi suatu negara memberikan hasil-hasil yang substansial dengan tujuan pada kebijakan luar negeri, tujuan nasional negara maupun untuk mempertahankan hubungan dengan negara lain.

Tumpuan pelaksanaan dari *soft power diplomacy* berlandas pada daya tarik sebagai kemampuan bagi aktor negara maupun non-negara untuk dapat mendorong tujuan atau ambisi yang diinginkan. Dalam substansi yang sama juga memberikan gagasan dimana kemampuan dalam *soft power* berbasis pada kapabilitas dalam membentuk preferensi pihak lain (Nye, 2019). Kesuksesan yang dibawa oleh *soft power diplomacy* juga memiliki kekurangan yang signifikan, dimana akibat dari sifat *soft power diplomacy* yang tidak berwujud (*intangible*) dan terdapat ketelibatan masyarakat umum di dalamnya membuat prediksi dan memasang target hasil daripada *soft power diplomacy* sulit untuk dilakukan. Walaupun begitu, justru pengembangan praktik *soft power diplomacy* mengalami peningkatan yang intensif diantara negara-negara global.



Secara rasional, penggunaan *soft power diplomacy* bagi negara-negara yang kurang dalam penguasaan *hard power* merupakan pilihan yang tepat sebagai faktor keberhasilan dalam menjaga kepentingan nasional dalam lingkup diplomasi (Soesilowati, 2017). Bagi Indonesia sendiri, pemilihan praktik diplomasi ini merupakan pilihan yang bijak, atas alasan *hard power* yang dimiliki Indonesia sebagai kekuatan nasional dikatakan kuat tetapi tidak didukung oleh kualitas. Indonesia merupakan negara yang luas dengan potensi SDA dari pulau-pulau yang banyak serta jumlah penduduk yang jumlahnya melimpah. Namun, dalam hal untuk dapat diandalkan, kondisi fisik yang ada belum memadai dengan sempurna untuk digunakan sebagai *hard power*. Maka, pengendalian akan penggunaan *soft power diplomacy* menggunakan modal-Modal yang sesuai dengan karakter maupun kapabilitas RI seperti orientasi politik bebas aktif, kekuatan dalam nilai-nilai budaya, maupun tatanan politik berlandaskan demokrasi, yang mana modal-Modal ini dapat menjadi basis dalam membangun daya tarik atau '*attractiveness*' untuk menunjang *soft power diplomacy*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini disusun oleh jawaban ataupun sumber-sumber yang didapatkan melalui metode penelitian kualitatif. Konsep penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan melalui pengamatan terhadap objek yang mana dalam hal ini merupakan fenomena sosial untuk

dapat dikelola oleh pola pikir dengan tujuan menghasilkan penarikan kesimpulan (Harahap, 2020).

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mengambil pengukuran data berdasar pada variabel dan analisis statistik, penelitian jenis kualitatif mencoba memahami suatu masalah melalui pengukuran ‘mengapa’ dan bagaimana’ sehingga terdapat eksplorasi mendalam terhadap kejadian yang ada. Umumnya, metode yang sering digunakan dalam mengumpulkan data dalam jenis penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara, fokus kelompok, maupun observasi terhadap partisipan yang kemudian dapat menjadi sumber wawasan dalam fenomena berunsur sosial, budaya maupun psikologis. Salah satu keunggulan yang dimiliki dengan penggunaan penelitian kualitatif adalah fleksibilitas yang memberikan penulis kemampuan untuk melakukan penyesuaian dalam metodologi ketika penelitian dilakukan. Ini kemudian menjadi hal yang penting bagi pembahasan yang memiliki hipotesis yang kemungkinan tidak secara utuh menangkap kompleksitas interaksi manusia.

Penelitian kualitatif berdasar pada proses pemaknaan yang dilakukan tanpa data yang setepat-tepatnya, dalam artian data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data deskriptif ataupun narasi. Dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa penelitian jenis ini memiliki kecenderungan yang interaktif terhadap penelitian yang diteliti lalu membawa interaksi yang didapatkan kepada realitas. Hal ini

berkesinambungan pada pembawaan jenis penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif dan bukan dalam wujud angka-angka (Somantri, 2005). Melihat objek penelitian yang diteliti oleh penulis tidak berbasis pada pengukuran yang spesifik terhadap perhitungan angka, maka penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan perolehan hasil penelitian yang maksimal.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Berangkat dari pemilihan metode penelitian atau jenis penelitian yang akan dilakukan, untuk mengumpulkan data-data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data penelitian literatur (*literature research*) yang secara umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Penelitian literatur sebagai teknik pengumpulan data melampirkan berbagai hasil studi berupa teori-teori maupun konsep yang mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu (Agustini et al., 2023).

Penggambaran sistematika pengumpulan data menggunakan penelitian literatur secara umum merupakan cara yang sistematis dalam mengumpulkan maupun menggabungkan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan pendalaman penggunaan teknik pengumpulan data ini dengan baik dapat menjadi dasar untuk pengembangan pengetahuan yang kemudian juga dapat menunjang pengembangan teori. Penemuan-penemuan berbagai perspektif dan temuan empiris yang didapatkan

melalui penelitian literatur ini dapat menuntun pada solusi maupun kesimpulan yang tidak dimiliki pada penelitian tunggal (Snyder, 2019).

Sumber-sumber dari penelitian literatur tidak terbatas pada bacaan literatur, identifikasi struktur teori, maupun menyusun masalah yang akan diteliti. Namun, penelitian literatur juga menjangkau pada tiap proses interaksi objek penelitian yang didapatkan dengan studi-studi sebelumnya.

Melalui penjabaran di atas, penulis melakukan studi pustaka berupa data-data sekunder yang mana berupa artikel, dokumen, jurnal, maupun sumber-sumber lainnya yang memiliki data kredibel untuk digunakan dalam penelitian. Observasi literatur dilakukan untuk memahami fenomena yang sedang diteliti bersamaan dengan pemahaman akan konsep-konsep dan teori yang berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan.

### **3. Teknik Analisis Data**

Pada penelitian yang dilakukan ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif untuk memberikan pemahaman penjelasan mengenai substansi program Women20 yang sesuai pada judul penulis, bersamaan dengan variabel-variabel yang bersangkutan yaitu mengenai dampak diplomasi Indonesia dan kesetaraan gender di Indonesia. penggunaan teknik analisis data deskriptif ini juga digunakan untuk dapat menjelaskan keterhubungan variabel-variabel yang ada dalam judul penulis yaitu, Dampak Diplomasi Indonesia Melalui Program Women20 Terhadap Kesetaraan Gender di Indonesia.

## G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini tersusun dari lima bab yang pada masing-masing bab memiliki bahasannya masing-masing, yaitu:

- 1) **Bab I Pendahuluan**, di dalam bab ini terdapat enam bagian, yaitu latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2) **Bab II Tinjauan Pustaka**, fokus pada bab ini adalah penjabaran dan penjelasan mengenai teori dan konsep yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Selain itu, bab ini juga berisi bahasan mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadi pedoman maupun perbandingan dari penelitian dengan topik yang mirip.
- 3) **Bab III Gambaran Umum**, bab ini memiliki isi yang membahas mengenai apa itu Women20 mulai dari strukturnya hingga tujuan-tujuan yang dimiliki dalam pelaksanaan forum kerja sama tersebut. Bab ini juga membahas mengenai kesetaraan gender baik secara konsep maupun bagaimana kondisi kesetaraan gender di Indonesia. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai gambaran konseptual strategi diplomasi.
- 4) **Bab IV Analisis dan Pembahasan**, bab ini membahas mengenai jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah yang ada pada Bab I dengan landasan analisis sesuai dengan konsep dan teori yang digunakan.

**5) Bab V Penutup,** bab ini memiliki isi penarikan kesimpulan dari analisis dan pembahasan pada bab empat (4) yang membahas masalah penelitian. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai saran mengenai kekurangan atau hal yang perlu untuk diperhatikan mengenai penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Feminisme Liberal**

Perlu ada pemahaman awal bahwa tindakan penindasan terhadap dasar gender yang merupakan penegasan dari sistem patriarki dalam masyarakat barat menjadi pemicu awal lahirnya feminisme liberal (Maulana et al., 2021). Persepsi salah yang kemudian berkembang dalam masyarakat mengakibatkan pada keadaan yang diskriminatif antara perempuan dan laki-laki. Keadaan yang merupakan penindasan oleh laki-laki kepada kaum perempuan ini berujung pada berbagai tragedi buruk seperti pemerkosaan, penganiayaan, pembunuhan, maupun tindakan brutal lainnya yang dirasakan oleh perempuan barat. Kekerasan yang berlandas pada gender ini, bagi feminisme liberal telah merusak pokok dasar hak asasi manusia dikarenakan oleh pelanggaran terhadap kesetaraan serta hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan pada peradaban barat.

Konstruksi sosial menjadi hal yang mendorong identifikasi kelompok yang membawa pada identifikasi maskulin dan feminim, yang mana ini merupakan keterbawaan dari klasifikasi jenis kelamin secara biologis, apa yang membedakan kemudian adalah konstruksi sosial terbentuk dalam masyarakat dan bukan berdasarkan sesuatu yang ilmiah. Gender disatu sisi, merupakan penggabungan antara struktur biologis dasar manusia dan pemaknaan budaya domestik, yang mana tergantung pada tiap kumpulan

masyarakat yang memiliki orientasi pengenalan akan peran maskulinitas dan feminimisme.

Pada dasarnya, ketidaksetaraan gender berangkat dari adanya stereotip gender terhadap kaum laki-laki dan perempuan. Stereotip dalam hubungannya dengan gender, merupakan kekeliruan atau asumsi yang tidak tepa tatas gambaran terhadap individu maupun suatu kategori. Ini kemudian membawa pada keyakinan akan bagaimana sebuah spesifikasi yang seharusnya dan tidak seharusnya ditujukan pada golongan sosial tertentu ataupun peran yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan oleh anggota golongan sosial tertentu. Klasifikasi seperti yang terjadi dalam sistematisasi masyarakat ini seringkali menjadi instrumen atas pembenaran perilaku satu pihak terhadap pihak lainnya. Di samping itu juga, klasifikasi ini memberikan gambaran hadirnya hubungan yang tidak seimbang dimana satu pihak menaklukkan atau mengendalikan pihak lainnya.

Keberadaan masyarakat yang heterogen melahirkan kehidupan bermasyarakat yang memiliki sebuah tujuan pada sebuah idealisme umum maupun privat. Dalam perspektif yang dibawakan oleh (Taylor, 2018) masyarakat yang liberal membawa pada kehidupan masyarakat yang netral, bagaimana kehidupan yang baik bagi tiap-tiap individu memiliki perbedaan dengan cara masing-masing individu, dengan demikian pemerintah memiliki peran yang netral dan menunjukkan penghormatan pada semua warga negara. Konsep dasar dari liberalisme yang membawa pada kebebasan individu serta kesetaraan dalam hadapan hukum menjadi salah satu filosofi



politik dan moral yang umum pada ide maupun aksi yang berkembang bukan hanya pada masyarakat namun juga negara. Dalam hal ini kemudian, negara liberal pada dasarnya tidak memiliki kepentingan dan bias pada kepentingan maupun kelompok tertentu dan mengusung tindakan-tindakan bagi negara dan masyarakat yang menguntungkan secara universal. Dari pandangan Taylor maka, aturan-aturan yang hadir di antara masyarakat harus memiliki fungsi yang mengakomodasi visi individual sebanyak mungkin.

Gender kemudian menjadi salah satu kepentingan yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan ataupun moral dari liberalisme, dimana upaya penegakkan gender menjadi tindakan untuk mendapatkan manfaat secara universal dan tidak berat pada satu pihak. Penggunaan teori liberal banyak digunakan oleh para pejuang feminis awal untuk memperjuangkan kesetaraan maupun penerimaan kaum perempuan. Salah satunya adalah Mary Wollstonecraft kritikus yang banyak dihormati pada masanya memberikan pendapatnya bahwa dengan pemenuhan yang cukup atas pendidikan, dorongan interaksi sosial, dukungan rumah tangga, olahraga dan pekerjaan yang bernilai, perempuan layak menjadi warga negara utuh dalam pemerintahan mana pun (Wollstonecraft, 2006). Selain itu, terdapat pula (Friedan, 1963) dalam karyanya yang berjudul *The Feminine Mystique* dimana Friedan melakukan observasi terhadap permasalahan perempuan Amerika, menyebutkan bahwa solusi dari permasalahan perempuan warga Amerika saat itu adalah dengan melakukan partisipasi aktif dalam dunia

pendidikan, kegiatan elektoral dan semua institusi publik, dalam hal ini secara mendasar memiliki pondasi pada ideologi liberal dalam menjalankan tujuan politik.

Penggunaan feminisme liberal kemudian menjadi salah satu ideologi yang memberikan pengaruh besar pada masa-masa awal dalam pergerakan perempuan. Alice Echols salah satu spesialis dalam gender, pada tahun 1970-an awal memberi gambaran atas feminisme liberal yang menjadi suara bagi feminisme yang memberi jalan pada penentuan rencana politik bagi aktivitas perempuan dalam masyarakat luas. Echols menyelidiki jatuhnya strategi yang mengarah pada sistematika radikal dengan hadirnya feminisme liberal, dengan melihat bahwa keberadaan feminisme liberal yang lebih praktis dalam membawa perempuan pada arus utama dan lebih realistis, dibandingkan dengan feminisme radikal yang melakukan perombakan terhadap dasar kehidupan privat dan publik.

Pembawaan konsep kebebasan pada feminisme liberal berasal dari landasan gagasan bahwa tiap-tiap individu merupakan makhluk hidup yang memiliki kemampuan berfikir dan mengambil tindakan secara rasional, hal ini tidak mengecualikan perempuan, sehingga perjuangan atas tuntutan keseimbangan hak-hak sebagai makhluk sosial bagi kaum perempuan yang merasakan penindasan hak-hak dilakukan. Sistem patriarki yang berkembang di masyarakat bagi kaum feminisme liberal merupakan suatu unsur yang dapat dihilangkan dengan langkah perubahan pendekatan maupun tindakan dari tiap-tiap individu, khususnya pada keterhubungan

perempuan dengan laki-laki. Dalam hal ini, perlu adanya kesadaran bagi kaum perempuan untuk menuntut hak-hak mereka. Sehingga, pemenuhan kesadaran yang telah merata ini kemudian akan menciptakan sebuah masyarakat baru, dimana pemenuhan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat terjadi di dalamnya (Rokhmansyah, 2016).

## **B. Multilateralisme**

Multilateralisme menjadi sebuah konsep yang telah ada sejak berakhirnya Perang Dunia ke-II dimana konsep ataupun pemahaman ini telah menjadi sarana dalam menghadapi berbagai permasalahan komunitas internasional. Namun, konsep multilateralisme saat itu masih masih berkorespondensi dengan kepemimpinan Amerika Serikat yang menjadi figure kekuatan liberal barat yang mendominasi tatanan global. Dengan inti dari konsep multilateralisme yang merupakan sebuah praktik dengan tiga ataupun lebih negara di dalamnya yang terkoordinasi dengan kebijakan ataupun prosedur tertentu dengan sebuah institusi ataupun tujuan tertentu yang signifikan atas pembentukannya.

Dengan permasalahan maupun segala hal yang dihadapi realitas kontemporer, membuat konsep dari multilateralisme perlu untuk melakukan penyesuaian dengan konsep masa kini. Keberadaan Amerika Serikat yang tidak lagi menjadi satu-satunya negara superpower, seperti dengan kebangkitan Tiongkok, membuat sistemika global bergeser. Hadirnya Tiongkok dengan segala aspirasinya dalam tatanan global dapat memberikan

pengaruh pada berbagai sisi multilateralisme, meliputi pendanaan dan tindakan statis, hingga tata nilai (Ang, 2023).

Selain itu, realitas politik seperti pada permasalahan ketidaksetaraan, perbedaan iklim, konflik antar negara-negara besar maupun pada lingkup regional, hingga isu kesehatan memberikan perbedaan yang signifikan mengenai bagaimana cara multilateralisme bisa bekerja dengan realitas politik yang terus berjalan untuk dapat melakukan rekonstruksi pada tata kelola dalam pengelolaan dan pelestarian global. Penting untuk dipahami eksistensi adaptasi nilai-nilai dari konsep multilateralisme dengan realitas politik yang baru agar pembangunan tata kelola dapat terjadi. Realitas politik yang berbeda dari masa lalu ini kemudian merujuk pada dasar-dasar yang dibawakan dalam Piagam PBB dan tiga fondasi yang dibawakan yaitu, hak asasi manusia, pembangunan, serta rekonsiliasi dan keamanan (Espinosa, 2023). Selain dari realitas politik, perkembangan teknologi dan sosial media juga memberikan efek yang signifikan. Dimana, media sosial dapat menjadi alat komunikasi yang dapat mendukung demokratisasi bagi penggunanya yang memiliki akses untuk mendapatkan perhatian secara global melalui unggahan. Di sisi lain, media sosial dapat berbalik arah dan memicu lebih banyak konfrontasi dan ketegangan publik. Bagaimanapun, media sosial dapat menjadi alat yang membuahkan hasil tergantung dari proses pengelolaan dan penggunaannya.

Restrukturisasi mendasar terhadap multilateralisme telah menjadi pembahasan. Masalah global yang semakin berat dihadapi dunia,

memerlukan langkah kolektif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Salah satu narasi yang dibawakan oleh (Narlikar, 2021) membahas bagaimana salah usaha pengembangan restrukturisasi multilateralisme adalah dengan melihat bagaimana multilateralisme terintegrasi dengan desain kelembagaan. Dengan sinergi ekonomi yang makin meningkat sehingga telah melahirkan bukan saja peluang dalam memperoleh keuntungan, namun juga dapat menjadi senjata ataupun alat untuk saling bergantung. Skema multilateralisme yang idealnya membawa ikatan dan interaksi negara-negara untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran, dapat digunakan dengan tidak tepat dan berujung pada persaingan geopolitik. Integrasi multilateral dalam realitas global saat ini perlu dilakukan revitalisasi dan reformasi untuk mengikuti tatanan global yang saling bergantung.

Keberadaan interaksi diplomatik dari tiga ataupun lebih negara-negara dalam sistematika multilateralisme membawa prinsip ini pada klasifikasi yang murni formal, dimana regulasi multilateral membawa konteks ‘bagaimana’ daripada ‘apa’ mengenai tindakan ataupun perilaku dan bukan mengenai pokok maupun tujuan politik global. Secara sederhana, multilateralisme juga dapat dilihat sebagai alat diplomasi dalam mencapai tujuan tertentu dengan titik akhir yang tidak ditentukan (Maull, 2020). Konsep multilateralisme yang adaptif dapat dilihat dalam penggunaan konsep multilateralisme pada kebijakan luar negeri Jerman yaitu multilateralisme II dimana konsep ini membawa interaksi diplomatik yang

dilakukan oleh lebih dari dua aktor secara terkoordinir dengan prosedur sesuai pada struktur organisasi antar negara, dimana ini berbasis pada pelaksanaan yang sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang melandasi organisasi tersebut. Pada interpretasi multilateralisme ini, kebijakan luar negeri tidak hanya berlaku sebagai strategi dan langkah terhadap rangkaian diplomasi tertentu, namun juga menjadi bentuk komitmen terhadap dasar-dasar tertentu, sasaran tertentu, serta strategi-strategi kebijakan luar negeri bersamaan dengan kumpulan prinsip dan norma yang mendasarinya.

Maka kemudian, penafsiran akan multilateralisme meengindikasikan pada bagaimana kebijakan luar negeri dalam pola aturan rangkaian gagasan mengenai apa yang perlu diusahakan oleh diplomasi, dan bagaimana diplomasi tersebut memperoleh sasarannya. Dalam hal ini, konsep multilateralisme kemudian tidak hanya terkait pada norma dan asas, melainkan merupakan penafsiran bagaimana kebijakan luar negeri terlaksana untuk pencapaian tujuan dan sarana yang diinginkan. Ini juga berkaitan dengan struktur internasional yang dituju atau diharapkan dan peraturan atau keputusan yang dianggap ideal bagi aktor tertentu.

Prinsip berbasis aturan yang dibawa oleh multilateralisme kemudian menjadi bagian yang sering kali diadaptasi dalam struktur regional sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola internasional. Ini kemudian memberikan aktivitas timbal balik terhadap sistematika multilateral dengan struktur regional. Dimana, struktur regional menjadi potensi sebagai aktor penting dalam dialog internasional dan pengelolaan

internasional, sebaliknya, sistematika multilateral yang lahir dalam bentuk organisasi internasional seperti misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengandalkan implementasi tujuan organisasi untuk dilakukan oleh struktur regional, mencakup di dalamnya seperti pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs (Hosli et al., 2021).

### ***C. Soft Power Diplomacy***

Pemahaman mengenai kerangka konsep dari *Soft Power* diperkenalkan oleh Joseph Nye seorang ilmuwan politik asal Amerika Serikat pada akhir tahun 1980-an. Soft power dilihat sebagai kapabilitas daya tarik dalam mencapai hasil yang diinginkan yang berbanding terbalik dari penggunaan hard power dengan penggunaan seperti kekuatan militer ataupun sanksi ekonomi (Nye, 1990). Pada dasarnya, ini berarti penggunaan alat dalam membangun dan mewujudkan minat pihak lain menggunakan daya tarik yang mana ini biasanya berupa sumber yang tidak memiliki wujud. Sumber-sumber ini didapatkan melalui prinsip-prinsip politik, daya tarik budaya dan arah hubungan politik luar negeri suatu negara (Nye, 2004). Dalam pernyataan yang juga dibawakan oleh Joseph Nye memberikan penggambaran bagaimana kekuatan kooptasi yang bersifat '*soft*' berperan penting sama dengan kekuatan komando yang keras. Ketika sebuah negara memperlihatkan bentuk ideologi dan budayanya yang menarik, maka negara lain tanpa paksaan akan mengikutinya. Jika suatu negara dapat melakukan implementasi maupun membatasi aktivitas seperti

ambisi negara-negara dominan sehingga dapat mengambil citra kepada negara lain, maka negara tersebut memperoleh kemungkinan terbebas dari penggunaan kekuatan koersif ataupun kekuatan yang bersifat mahal.

*Soft power* dalam pernyataan Nye diartikulasikan sebagai operasional, tindakan ataupun sistematika yang dilakukan oleh negara, pemerintah, organisasi maupun individu yang bukan berdasar pada budaya tertentu, melainkan dilakukan akan dasar ataupun prinsip-prinsip alamiah. Rangkaian prinsip-prinsip alamiah ini mencakup seperti hak asasi manusia, demokrasi, kebebasan individu dan pasar bebas. Dalam hal ini, pelaksanaan *soft power* terhadap negara lain penting untuk dilakukan dengan susunan yang alami dari diversifikasi aktor secara global yang kemudian membawa pada tindakan aktor lain dapat sama dengan agen pengirim (Zanella et al., 2024). Dalam strategi yang ideal, identitas bersama akan menciptakan sebuah dunia yang merupakan hasil dari cerminan negara pusat, penyebar nilai-nilai yang memberi dorongan.

Penggunaan *soft power* oleh negara-negara meningkat demi mendapatkan kepercayaan, membangun hubungan serta untuk mengangkat atau membawa kepentingan dan nilai-nilai suatu negara menggunakan bantuan kemanusiaan, pertukaran budaya dan program pendidikan. *Soft power* dari suatu negara berasal dari prinsip, budaya, institusi, bahkan agama suatu negara yang kemudian dapat menjadi alat dalam



mempengaruhi aktor lain melalui penggunaan media, bantuan, diplomasi dan pendidikan (Haynes, 2021).

Kategorisasi *soft power* terangkum dalam beberapa tipe, yang mana mencakup ideologi, budaya, edukasi, hingga *soft power* ekonomi (Saaida, 2023). *Soft power* ideologi merupakan bentuk penggunaan kekuatan lunak melalui promosi prinsi-prinsi politik suatu negara, misalnya promosi hak asasi manusia ataupun demokrasi kepada negara lain. *Soft power* budaya merupakan jenis yang paling sering didapatkan, dimana ketika suatu negara membawa pengaruhnya terhadap negara lain dengan menggunakan komoditas budayanya. *Soft power* melalui komoditas edukasi merupakan gerakan suatu negara dalam menggunakan agenda penddiikannya, biasanya negara-negara yang menggunakan komoditas edukasinya memberikan agenda pertukaran pelajar ataupun penawaran beasiswa. Kemudian, *soft power* ekonomi memberikan pembawaan suatu negara yang menggunakan regulasi dan pelaksanaan ekonominya (Yueh, 2020).

Pergeseran arah penggunaan kekuatan yang mayoritas digunakan secara aktif bagi negara-negara dalam hubungan internasional yaitu pergeseran dari penggunaan *hard power* ke arah *soft power* ini Sebagian dipengaruhi oleh faktor keterhubungan dunia. Bagaimana berjalannya negara-negara secara global saling tergantung dan tidak terlepas dari pengaruh satu sama lain melalui berbagai faktor yang mempengaruhi seperti perdagangan, komunikasi, teknologi dan lainnya memberikan penggunaan *soft power* dalam pelaksanaan hubungan internasional lebih signifikan.

Perkembangan arah ini dalam hubungan internasional adalah sebuah gambaran penting akan bagaimana politik global terbentuk melalui fungsi yang dijalankan oleh prinsip, ide maupun budaya. Yang kemudian sistematika dan konsep ini memberikan dorongan yang lebih besar terhadap persepsi dan kerja sama di antara negara-negara sehingga pembangunan sistem internasional dapat lebih kokoh dan damai.

Dalam sistematika diplomasi tradisional, *soft power* memiliki peningkatan peran penting. Hal ini bersandar dari bagaimana negara-negara memiliki kesadaran akan kebutuhan yang esensial terhadap pembangunan hubungan luar negeri dan promosi kerja sama bersama negara lain. Salah satu kelebihan yang dimiliki *soft power* dalam diplomasi adalah kapabilitasnya dalam memperoleh kerja sama dan kolaborasi melalui isu-isu yang merupakan kepentingan kolektif. Ini kemudian menjadi taktik yang lebih efektif dalam forum multilateral, dimana ketika *hard power* digunakan justru akan membawa pada penghambatan tujuan dan gangguan komunikasi serta kerja sama (Tran, 2024).

Sebagai bagian bentuk dari *soft power*, diplomasi digital menjadi perangkat yang berguna bagi suatu negara memperoleh reputasi internasional dan mempengaruhi opini publik. Tidak hanya itu, penggunaan teknologi dalam menjalankan diplomasi juga berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan yang efisien bahkan dapat dikatakan aman jika mengaitkan dengan peristiwa Covid-19 yang membuat interaksi secara langsung menjadi terbatas. Pemanfaatan media digital, memberikan

kemampuan bagi negara-negara untuk bisa mengangkat prinsip, nilai dan keyakinan mereka, mewujudkan hubungan secara global, serta dapat membentuk opini publik. Praktik diplomasi kemudian memiliki hubungan yang tidak bisa dikesampingkan dengan *soft power* dan diplomasi digital, karena pentingnya faktor-faktor tersebut dalam membangun hubungan serta keberlangsungan interaksi antar negara (Lahrenn & Bilgin, 2023).

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam proses penelitian ini dengan judul yang dibawa yaitu, “Strategi Diplomasi Indonesia Pada Women20 Terhadap Peningkatan Kesetaraan Gender di Indonesia” peneliti memiliki penelitian acuan yang telah ada dan dilaksanakan sebelumnya. Adapun penelitian yang dimaksud adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yeni Herliana Yoshida dan Muhammad Farhan Kriswandwitanaya yang diterbitkan pada tahun 2023 dengan judul “Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum G-20 Tahun 2022”. Penelitian ini membahas mengenai langkah yang diambil Indonesia dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dengan menggunakan diplomasi ekonomi melalui kepemimpinan Indonesia dalam forum G20 tahun 2022.

Dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai agenda-agenda dan dasar-dasar dalam pelaksanaan G20 yang juga mencakup dasar dari presidensi Indonesia pada G20 yang membawa gagasan utama “*Recover Together, Recover Stronger*” yaitu gagasan yang mendorong kerja sama

dalam restorasi ekonomi setelah pandemi yang lebih stabil dan sustainabel. Diplomasi ekonomi dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sebagai kunci dari kepentingan nasional Indonesia yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Momentum presidensi Indonesia dalam G20 tahun 2022 kemudian menjadi peluang dalam implementasi diplomasi ekonomi Indonesia. Kontribusi sumber daya UMKM, pariwisata, akomodasi maupun kuliner menjadi hal-hal signifikan yang menunjang berjalannya diplomasi ekonomi Indonesia. Selain itu pula, implementasi UU Cipta Kerja ke dalam diplomasi ekonomi Indonesia pada masa kepresidenan pada G20 memberikan penguatan terhadap diplomasi ekonomi Indonesia sebagai hal yang berbanding lurus dengan kepentingan nasional Indonesia.

Kepentingan-kepentingan Indonesia dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi pada kepresidenan Indonesia di G20 untuk mendorong pembangunan ekonomi nasional menjadi sebuah peluang. Salah satu potensi peluang ini dapat dilihat dari daya tarik investor yang dapat memberikan perkembangan investasi di Indonesia dengan mengundang perhatian negara-negara lain. Implementasi kepentingan nasional juga memberikan dampak secara implisit terhadap implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Selain itu pula, momentum ini menjadi sarana bagi Indonesia untuk menyampaikan mengenai UU Cipta Kerja yang juga dalam hal ini diperkenalkan sebagai aspek yang juga memperhatikan lingkungan. Dalam gambaran besar, presidensi Indonesia dalam G20 menarik pemanfaatan dari forum tersebut yang membawa

kepentingan nasional dengan arah utama diplomasi ekonomi melalui investasi asing.

Penelitian kedua terdapat penelitian oleh Intan Dwi Masrullah yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul “Pengarusutamaan Gender di Jepang Untuk Mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*) Dalam Perspektif Feminisme Liberal”. Penelitian ini berisi mengenai usaha Jepang dalam mewujudkan pengurangan kesenjangan gender dengan melakukan penerapan nilai-nilai SDGs. Salah satu poin penting dalam penelitian ini adalah Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) yang juga menjadi landasan konsep dalam penelitian ini. Pengarusutamaan gender sendiri merupakan konsep yang mengusung ketercapaian gender yang bukan hanya mengenai kesetaraan gender. Ini berarti menjadi sebuah pendekatan dalam membangun tujuan pada kesetaraan dan keadilan. Tujuan dari pengarusutamaan gender ini adalah pemberlakuan nilai kesetaraan dalam lembaga, yang mana ini dengan melakukan integrasi norma dan praktik yang sadar akan gender dalam mekanisme, tatanan serta lingkup regulasi publik.

Dalam melakukan Analisa aktivitas gender yang dilakukan peneliti yang dalam kasus ini terhadap Jepang, peneliti membawa konsep analisis *Gender Impact Assessment* (GIA). GIA memiliki fungsi dalam analisis agenda gender yang terjadi pada suatu negara untuk melihat apakah kesetaraan gender dapat berkurang ataupun dalam nilai tetap dari hasil kebijakan, hukum maupun program-program mengenai gender. Selain itu

pula, GIA juga memiliki fungsi dalam mengukur dan menilai apakah standar gender yang tepat telah diadopsi dan disesuaikan dalam kebijakan yang ada. Selain GIA terdapat pula Konsultasi Pemangku Kepentingan (*Gender Stakeholder Consultaion*) yang memiliki tugas dalam promosi bagaimana keterlibatan ikut serta bukan hanya perempuan dan laki-laki namun juga komunitas yang terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dan memastikan terdapat vokalisasi keberadaan mereka dalam kebijakan-kebijakan serta tiap program.

Integrasi analisis gender pada penelitian ini juga menjadi hal tidak dapat dipisahkan, sebagaimana analisis gender menjadi alat dalam mendapatkan basis informasi untuk sinergi perspektif gender pada program, regulasi serta proyek yang memberikan identifikasi terhadap divergensi antara laki-laki dan perempuan terhadap hubungan kedua kelompok tersebut dalam masyarakat serta bagaimana partisipasi, pengendalian, akses dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Gambaran besar dari penelitian yang melihat Jepang dalam mengangkat unsur gender dalam agenda pemerintahan ini juga melibatkan kaitannya dengan sistematika internasional, SDGs menjadi salah satu pilar utama dalam perencanaan nasional Jepang. Namun, yang menjadi arus permasalahan dari target agenda tersebut adalah tingkat Jepang yang masih menduduki posisi rendah dalam kesetaraan gender. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini adalah, generalitas tradisional masyarakat dan pemamahan serta komitmen perangkat-perangkat dan masalah anggaran

pemerintahan Jepang yang kurang terhadap unsur gender. Kemudian, dalam sistem pemilihan Jepang, kelompok-kelompok kecil justru memberi pengaruh yang besar dalam mencapai posisi yang tinggi dalam parlemen, sehingga membawa pada kesulitan untuk perempuan masuk dalam bagian tersebut tanpa pengaruh jabatan yang tinggi.

Dari pemaparan penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat beberapa persamaan yang dapat memberikan gambaran yang signifikan dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian “Strategi Diplomasi Indonesia Pada Women20 Terhadap Peningkatan Kesetaraan Gender di Indonesia” ini. Untuk penelitian pertama yaitu “Strategi Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Memajukan Pembangunan Ekonomi Nasional Melalui Kepemimpinan Indonesia Dalam Forum G-20 Tahun 2022” memiliki kesamaan objektivitas penelitian dimana penelitian ini sama meneliti strategi diplomasi Indonesia dan juga penelitian terhadap forum G20 yang secara spesifik membahas mengenai presidensi Indonesia pada forum tersebut ditahun 2022. Dalam penelitian sebelumnya berfokus pada kemajuan pembangunan ekonomi melalui G20, sementara itu, penelitian ini memiliki fokus pada peningkatan kesetaraan gender melalui grup langsung dari G20, yaitu Women20 (W20).

Pada penelitian kedua yang memiliki judul “Pengarusutamaan Gender di Jepang Untuk Mencapai SDGs (*Sustainable Development Goals*) Dalam Perspektif Feminisme Liberal” memiliki kesamaan akan pembawaan agenda gender pada suatu negara untuk mewujudkan

pembangunan nasional dan juga agenda global. Selain itu pula terdapat penggunaan perpektif feminisme liberal yang kendati sama dengan penggunaan teori dalam penelitian “Strategi Diplomasi Indonesia Pada Women20 Terhadap Peningkatan Kesetaraan Gender di Indonesia” ini. Penelitian sebelumnya membawa fokus pembahasan pada normalisasi unsur gender pada pemerintahan, masyarakat serta perangkat dan aspek-aspek terkait di Jepang. Sementara itu, pada penelitian ini apa yang menjadi fokus adalah agenda pemerintahan Indonesia dalam mengangkat isu gender pada forum yang tengah dilaksanakan dengan menggunakan perangkat diplomasi untuk mendorong kesetaraan gender.